



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIF FAUZAN**
2. Jabatan : **SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT PENGADAAN**
3. NHK : **128008**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 16.600.000.000

1. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/150 m2 di KAB / KOTA
GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/110 m2 di KAB / KOTA
GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL
SENDIRI Rp. 750.000.000
5. Bangunan Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/242 m2 di KAB / KOTA KOTA
SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 4.700.000.000
7. Tanah Seluas 482 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL
SENDIRI Rp. 3.850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 452.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 277.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 16.744.812.544



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 34.073.812.544

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 34.073.812.544

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.